

# KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA JUNI 2012

Dalam laporan kegiatan AKD-DPR awal Juni 2012 ini, digambarkan kegiatan DPR dalam Bidang perundang-undangan, bidang anggaran dan bidang pengawasan. Berikut ringkasannya:

## Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Rapat Paripurna tanggal 24 Mei 2012 mengagendakan Pandangan Fraksi Fraksi terhadap Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2013. Semua fraksi telah memberikan pandangan terhadap berbagai substansi yang dijelaskan oleh Pemerintah pada Rapat Paripurna tanggal 16 Mei 2012. Adapun tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi DPR-RI terhadap Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2013, antara lain sebagai berikut:

[1] Terkait dengan **asumsi nilai tukar rupiah**, Pemerintah sependapat bahwa nilai tukar yang rendah dan stabil sangat diperlukan untuk menjaga daya saing dan stabilitas perekonomian nasional.

[2] Terkait dengan permasalahan inflasi dan potensi tekanan kenaikan inflasi yang bersumber dari gejolak harga bahan pangan, Pemerintah memahami bahwa laju inflasi yang rendah dan stabil juga menjadi prasyarat untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk meredakan laju inflasi yang didorong oleh kenaikan harga bahan pangan, Pemerintah berupaya dengan alokasi anggaran dan koordinasi untuk menjamin ketersediaan pasokan komoditas pangan di pasar domestik, disamping juga terus meningkatkan pasokan dan produksi bahan pangan dari sumber dalam negeri.

[3] Terkait dengan asumsi harga minyak mentah ICP (*Indonesian Crude-petroleum Price*), dapat disampaikan bahwa harga minyak mentah telah menunjukkan tren penurunan seiring turunnya laju pertumbuhan ekonomi China dan berlarutnya krisis Eropa. Namun demikian, proyeksi harga minyak mentah tidak akan mengalami penurunan yang signifikan mengingat membaiknya ekspektasi perekonomian global pada tahun 2013 dan ketegangan di Timur Tengah.

[4] Tentang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Ali



dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta dorongan untuk sektor pertanian dan manufaktur, Pemerintah sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dan berkelanjutan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mendukung pencapaian hal tersebut, Pemerintah telah berupaya meningkatkan alokasi anggaran terutama untuk pembangunan infrastruktur, berlanjut berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat (akan diintegrasikan dalam Masterplan Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia- MP3KI), dan bantuan subsidi untuk pertanian.

[5] Terkait dengan arah kebijakan fiskal, Pemerintah sependapat dengan pandangan anggota Dewan, bahwa

dalam rangka mendukung sasaran pembangunan, strategi yang ditempuh pemerintah perlu berpedoman pada 4 (empat) pilar: *pertama*, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*pro growth*); *kedua*, menggerakkan sektor riil dan perluasan kesempatan kerja (*pro job*); *ketiga*, mendorong harmonisasi dan sinkronisasi program-program perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan efektifitas pengentasan kemiskinan (*pro poor*); serta empat, mendorong pencapaian target pembangunan dengan tetap menjaga konservasi lingkungan (*pro environment*).

## Penyampaian LHP BPK-RI atas LKPP tahun 2011

BPK-RI dalam memenuhi amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, khususnya paket UU tentang Keuangan Negara, hari Selasa 29 Mei 2012, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) tahun 2011 yang terdiri dari: [1] Ringkasan Eksekutif; [2] LHP atas Laporan Keuangan; [3] LHP Sistem Pengendalian Intern; [4] LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; [5] Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2005-2010; dan [6] Laporan tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA :** BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra; Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

### Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011, Pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.211 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp 1.295 triliun. Pendapatan negara tahun 2011 tersebut mencapai 103,5% dibandingkan anggaran sebesar Rp 1.170 triliun atau sebesar 121,71% dibandingkan pendapatan tahun 2010 sebesar Rp 995 triliun. Jenis pendapatan yang mengalami kenaikan paling tinggi dalam tahun 2011 adalah Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 150,57 triliun atau naik 20,82% dibanding tahun 2010. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2011 adalah sebesar Rp 874 triliun atau mencapai 99,43% dari anggaran sebesar Rp 879 triliun.

Belanja negara tahun 2011 meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, yang seluruhnya berjumlah Rp 1.295 triliun atau 98,03% dari anggaran sebesar Rp 1.321 triliun. Belanja negara juga mengalami kenaikan jika dibandingkan belanja negara tahun 2010 sebesar Rp 1.042 triliun, atau naik sebesar Rp 252,88 triliun atau 24,27%.

Atas LKPP tahun 2011 tersebut, BPK memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)** atau sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP tahun 2010. Namun akun pada LKPP tahun 2011 yang dikecualikan lebih sedikit dibandingkan pada LKPP tahun 2010.

### Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Raker Komisi V dengan Menteri Perhubungan dan berbagai pemangku kepentingan. Agenda Raker adalah legalitas penerbangan Sukhoi di Indonesia, krono,logis terjadinya kecelakaan, evakuasi korban kecelakaan dan pelaksanaan tanggungjawab penyelenggara Penerbangan Sukhoi SJ100

terhadap korban kecelakaan. Kesimpulan Raker antara lain: [1] Komisi V menyampaikan keprihatinan dan duka cita atas kecelakaan ini dan meminta Kemenhub menjadikan momentum ini untuk mengevaluasi keseluruhan penyelenggaraan penerbangan nasional serta memberikan jaminan bahwa wilayah udara Indonesia adalah aman untuk penerbangan domestik maupun internasional. [2] memberikan apresiasi kepada BASARNAS, TNI, Polri, Pemda, Ormas, dan para relawan, dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan operasi pencarian dan evakuasi korban. [3] mendesak KNKT untuk segera menuntaskan investigasi dengan tetap menjaga independensi dan integritas, serta menyerahkan hasilnya kepada Komisi V dan mempublikasikannya secara luas sesuai dengan ketentuan UU. Komisi V juga akan membentuk Panja kecelakaan Sukhoi SJ100. [4] mendesak Kemnhub, untuk melaksanakan UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan yaitu membentuk lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat Juli 2012 dan lembaga penyelenggara pelayanan umum paling lambat akhir 2012. [5] pihak Sukhoi (SCAC) melalui perwakilannya di Indonesia, PT. Trimargarekatama, untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk kesanggupan memberikan tanggungjawab asuransi kepada ahliwaris korban sesuai Permen Perhubungan No. 77 tahun 2011, selambat-lambatnya dua minggu dari 28 mei 2012.

### Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Pada Masa Sidang IV ini, Badan Musyawarah DPR RI pada rapatnya 24 Mei, telah menghasilkan keputusan yang berkaitan dengan bidang legislasi, khususnya penanganan beberapa RUU. Beberapa RUU tersebut dapat dilihat pada tabel.

### RUU Usul DPR

NO.	Nama RUU	Inisiatif Komisi DPR	Ditangani oleh
1.	RUU tentang Jalan	Inisiatif Komisi V DPR menjadi RUU DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2012	Ditangani oleh Komisi V
2.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Inisiatif Baleg dan menjadi RUU DPR pada Rapat Paripurna 6 Maret 2012.	Ditangani oleh Panitia Khusus (intinya pada Komisi II dan Komisi III).
3.	RUU tentang Perubahan atas UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.	Inisiatif Baleg dan menjadi RUU DPR pada Rapat Paripurna tanggal 12 April 2012.	Ditangani oleh Komisi III.
4.	RUU tentang Mahkamah Agung.	Inisiatif Baleg dan menjadi RUU DPR pada Rapat Paripurna tanggal 12 April 2012.	Ditangani oleh Komisi III.
5.	RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.	Inisiatif Baleg dan menjadi RUU DPR pada Rapat Paripurna tanggal 12 April 2012.	Ditangani oleh Pansus (komisi VI dan komisi IX)
6.	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan	Inisiatif Baleg dan menjadi RUU DPR pada Rapat Paripurna tanggal 12 April 2012.	Ditangani oleh Panitia Khusus (intinya pada Komisi I, Komisi II dan Komisi V).
7.	19 (sembilan belas) RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru.	Inisiatif Komisi II dan menjadi RUU DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 12 April 2012.	Ditangani oleh Komisi II.

## RUU dari Pemerintah

No.	Nama RUU	Ditangani oleh
1.	RUU tentang Keantariksaan.	Ditangani oleh komisi VII
2.	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).*	Ditangani oleh komisi XI

\*Catatan: khusus RUU tentang JPSK rapat Bamus di DPR RI menyetujui, menugaskan kepada Komisi XI DPR-RI untuk **mengkaji terlebih dahulu** RUU ini dan hasil kajian tersebut akan dilaporkan dalam rapat Bamus DPR RI

katkan hubungan baik melalui berbagai forum.

Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan bagaimana kedua parlemen saling kunjung-mengunjungi dan berhubungan lebih baik antar-kedua negara. DPR menginginkan hubungan yang sudah terjadi selama lima

## Pertimbangan DPD atas Beberapa RUU

No.	Nama RUU	Ditangani oleh
1.	RUU tentang Jaminan Produk Halal.	Diteruskan Komisi VIII (yang sedang membahas RUU tersebut).
2.	9 (sembilan) RUU tentang Pemekaran/ Pembentukan Kabupaten/Kota yaitu: Malaka, Merauke, Balanipa, Ketengban, Yakuhimo Utara, Yakuhimo Timur, Yakuhimo Barat Daya, Yakuhimo Barat Pegunungan Seir, Mamberamo Hulu.	Diteruskan kepada Komisi II yang sedang membahas berbagai RUU Pemekaran.
3.	RUU tentang Industri Pertahanan Keamanan.	Diteruskan kepada Komisi I (yang sedang membahas RUU tersebut).
4.	RUU tentang Pemerintahan Daerah.	Diteruskan kepada Pansus,
5.	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.	Diteruskan kepada Komisi IV.
6.	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.	Diteruskan kepada Badan Legislasi.
7.	Hasil Pengawasan DPD atas UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	Diteruskan kepada Komisi VII.
8.	Hasil Pengawasan DPD atas UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	Diteruskan kepada Komisi VIII.
9.	Hasil Pengawasan DPD atas UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Diserahkan kepada Komisi VI.
10	Keputusan DPD tentang RUU Partisipasi Masyarakat, sesuai dengan Peraturan DPR-RI tentang Tata-Tertib pasal 60 butir d dan h	Menugaskan Baleg untuk memberikan masukan kepada Pimpinan DPR-RI terkait dengan proses lebih lanjut terhadap RUU usul DPD dimaksud.

## Kunjungan Presiden Portugal

DPR-RI menerima kunjungan Presiden Portugal Casavo Silva, Rabu (23/5) pagi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 45 menit dan menyepakati adanya peningkatan hubungan antar-lembaga yang lebih baik. Kunjungan ini adalah kunjungan pertama Presiden Portugal, dan kedatangannya diharapkan bisa mening-

abad, dapat diwujudkan dalam bentuk konkret, misalnya kerjasama dalam bidang pariwisata dan pendidikan.

Menanggapi hal ini, Presiden Portugal menanggapi positif, bahkan ia juga membawa beberapa pebisnis untuk membangun investasi antara Indonesia dan Portugal.\*

# Panja Hambalang Sidak Pusdiklat Bukit Hambalang

Tim Panja Hambalang Komisi X DPR mengadakan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Bukit Hambalang, Sentul, Bogor.

“Maksud dan tujuan Tim Panja Hambalang Komisi X ke Bukit Hambalang ingin melihat secara langsung dan ingin meminta penjelasan dari penanggungjawab pembangunan ini atas tragedi amblasnya tanah Hambalang di tiga titik. Yaitu di Fondasi Bangunan Lapangan Badminton, Bangunan Gardu Listrik, dan di Jalan Nomor 13,” ujar Ketua Komisi X Mahyuddin.

Sementara Anggota Komisi X DPR Zulfadhli (F-PG), mengatakan dirinya semula meragukan penerusan pembangunan gedung Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Bukit Hambalang ini, Pasalnya, lokasi pembangunan Pusat Pendidikan, Latihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Bukit Hambalang sangat ekstrim.

Menurutnya, bangunan yang berlokasi di Bukit Hambalang ini harus dibangun secara komprehensif dari awal. “Kita tidak mau ini seperti kasus jembatan Kutai Kartanegara (Kukar), dimana bangunan jembatan itu belum beberapa tahun sudah ambruk,” tambahnya.



Lokasi amblasnya tanah Hambalang

Dia menambahkan, memang agak sulit kalau kita memberhentikan program ini karena sudah hampir final. Kalau memang bangunan ini terus dilaksanakan konsekuensinya tentu bangunan ini harus menjamin bahwa bangunan ini bisa dimanfaatkan secara aman dan benar, kata Zulfadhli.

Yang jelas, lanjutnya, nanti sepu-

lang dari Bukit Hambalang, Panja Hambalang Komisi X mengagendakan akan mengundang para ahli geologi, teknik sipil dan para ahli lainnya untuk memberikan masukan kepada Panja Hambalang Komisi X, apakah konstruksi bangunan dilokasi seperti ini layak atau tidak.

“Kalau memang pendapat para ahli bilang “tidak layak” ya konstruksinya harus dirubah daripada nanti akan terjadi persoalan lagi. Jadi kita tunggu saja nanti hasil kerja daripada Panja Hambalang,” jelasnya.

Dia berharap bangunan gedung Pusdiklat aman untuk jangka panjang dan betul-betul bisa bermanfaat dan efektif untuk Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional.

Kerugian akibat amblasnya bangunan di tiga titik ini bukan kerugian Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, terang Deputy Kemitraan Kemempora Lalu Wildat, berada pada PT Adhi Karyadan saat ini, PT Adhi Karya sedang menghitung kerugian akibat amblasnya bangunan itu kepada asuransinya,” tuturnya. (iw)/foto:iwan armanias/parle.



Zulfadhli (kiri), anggota Komisi X DPR RI

# Perumahan Swadaya Yang Tidak Efektif Berkontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Perumahan

Ketua Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan, penyelenggaraan perumahan swadaya yang tidak efektif sudah pasti memberikan kontribusi tidak efektifnya pemenuhan kebutuhan perumahan.

**H**al itu disampaikan saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Perumahan Rakyat dan jajarannya, Rabu (30/5) di gedung Nusantara DPR.

Yasti mengatakan, tidak sedikit masalah yang ditemui di daerah antara lain, penataan organisasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang turut mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan perumahan swadaya itu sendiri.

Penataan organisasi MBR/KSM yang baik, katanya, dengan tanpa hambatan birokrasi leveling pemerintahan, akan memberikan dampak positif pada akses pembiayaan dan subsidi secara langsung pada sumbernya.

Program perumahan swadaya merupakan salah satu program yang hadir untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan perumahan ku-

mu (rumah dan PSU) di lokasi yang mengelompok dengan komponen bantuan peningkatan kualitas dan bantuan PSU yang penggunaannya dilakukan bersama-sama dalam satu kelompok.

Yasti menambahkan, untuk pembangunan Rusunawa dimaksudkan sebagai salah satu solusi dalam penyediaan permukiman layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di perkotaan.

Saat ini, katanya, Rusunawa menjadi model alternatif penurunan kawasan kumuh di perkotaan melalui penyediaan hunian vertikal semakin memudar. Dari masalah lahan, infrastruktur dasar seperti air minum, listrik, aksesibilitas dan fasilitas umum hingga pada proses penghunian.

Namun sayangnya, dari Rusunawa yang sudah dibangun masih banyak rusunawa-rusunawa tersebut yang ti-

dak ditempati.

Untuk itu, dalam rapat kali ini Komisi V DPR ingin mendapatkan penjelasan dari Menpera berapa rusunawa terbangun, capaian tingkat penghunian rusunawa dan rusunawa belum terhu.

Dalam kesempatan tersebut, Yasti juga meminta penjelasan menteri, terkait upaya-upaya mengakomodir Rumah Khusus sesuai amanat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam UU tersebut diamanatkan Rumah Khusus yang dimaksud dalam UU adalah rumah yang diselenggarakan untuk kebutuhan khusus (transmigrasi, permukiman kembali korban bencana dan rumah sosial untuk menampung orang lanjut usia, masyarakat miskin, yatim piatu dan anak terlantar, serta termasuk juga untuk pembangunan rumah yang lokasinya terpencar dan rumah di wilayah perbatasan negara).

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menyampaikan, pagu anggaran Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2012 sebesar Rp 10, 637 triliun. Dimana pagu tersebut diantaranya dipergunakan untuk pembangunan rumah khusus sebanyak 8. 819 unit dengan total biaya kurang lebih Rp 309 miliar, pembangunan rusunawa dengan total anggaran Rp 1.207 triliun, pembangunan PSU perumahan swadaya sebanyak 15.180 unit dengan total anggaran Rp 60,7 miliar.

Sementara untuk penanganan pemukiman kumuh DAS Ciliwung yang diperuntukkan untuk pengembangan perumahan formal, biaya yang dianggarkan sebesar Rp 600 miliar. (tt) foto:ry/parle



Ketua Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow (tengah) saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Perumahan Rakyat dan jajarannya

# DPR Akan Perjuangkan RUU Desa Tuntas 2012 Ini

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, Pimpinan Dewan akan mendorong dan memperjuangkan penuntasan RUU Desa pada tahun 2012 ini.

“Saat ini RUU Desa memang sedang dibahas oleh Pansus RUU Desa dan Sejumlah anggota dewan telah melakukan proses pelengkapan naskah serta beberapa anggota sudah melakukan Kunjungan kerja, ke tiga provinsi yaitu Jawa Tengah, Sumbar, dan Papua,” ujar Taufik Kurniawan saat menerima Ketua Parade Nusantara Sudir Santoso dan Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pusat Ubaidi Rasidi serta rombongan, di Gedung Nusantara, Kamis, (31/5).

Menurutnya, hal ini merupakan bukti anggota dewan yang berada di Pansus RUU Desa ingin agar RUU ini dapat segera diselesaikan. “Saat ini merupakan saat yang paling tepat bagi bangsa dan negara untuk memberikan apresiasi sekaligus mendengarkan aspirasi dari rekan perangkat desa dan kepala desa, karena memang sudah saatnya bangsa negara ini memberikan yang terbaik mengingat proses perjuangan bangsa kita saat era Proklamasi dulu banyak dibantu oleh masyarakat desa,” ujarnya.

Dia menambahkan, berbicara masyarakat desa yang sesungguhnya bukan hanya pandangan fraksi tetapi memfokuskan persoalan ini sebagai bagian dari persoalan bangsa dan negara ini. “Mari kita memberikan apresiasi dan mendengarkan hasil dari kawan-kawan Parade dan PPDI ini,” paparnya.

Taufik mengatakan, kita seharusnya bukan berbicara atas nama golongan dan warna bendera partai apapun kecuali merah putih yang secara kontekstual berusaha memfokuskan kepada pembangunan pedesaan di Indonesia. “Kami berharap teman-teman Fraksi di DPR memiliki pandangan yang sama jangan ada istilah seperti jaman lalu, desa mendapat bantuan perbaikan jalan, jembatan, mesjid, perbaikan balai desa, lapangan bola dari kelompok



Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan

dan warna partai tertentu,” paparnya.

Dia menegaskan, saat ini kita tidak boleh mempolitisasi desa untuk kepentingan politik praktis. “karena memang bicara desa harus steril dari politik kecuali membicarakan persoalan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat desa,” ujarnya.

Jika dikaji secara mendalam terkait usulan Parade Nusantara yang ingin meminta dana 10 persen untuk desa, tambahnya, ini bukan berarti desa diberikan dana puluhan miliar untuk kepala desa, maupun uang tunai untuk kepala desa. artinya, DPR dan Pemerintah tinggal merelokasikan program dan dilakukan melalui satu pintu tanpa bermaksud mempolitisasi desa.

Sehingga, lanjutnya, apabila ada program pembangunan infrastruktur yang semakin terdesak dan peningkatan ketahanan pangan di tiap desa tentunya melalui mekanisme bottom up melalui kepala desa, perangkat desa maupun masyarakat desa, semuanya dapat menjadi masukan sebelum dibawah ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), ataupun Musyawarah Perencanaan Pem-

angunan Nasional (Musrenbangnas). “Saya tangkap itu bukan hal yang sulit dan perlu kita luluskan dan akan kita bawa usulan ini melalui Rapat Pimpinan, Rapat Konsultasi dengan Menteri Keuangan,” ujarnya.

Selama ini pemerintah, lanjut Taufik, sering mispersepsi dan mengeluhkan bahwa mereka selalu tidak ada anggarannya untuk desa. “Sebetulnya caranya hanya melakukan relokasi anggaran di Kementerian dan Lembaga (K/L) yang tersebar,” katanya. Karena kalau dipecah-pecah, kata Taufik, kementerian menjadi tidak sinkron dan dirinya mengkhawatirkan kepala desa kesulitan mempertanggungjawabkan anggarannya dan jangan sampai ada kepala desa yang ditangkap polisi maupun Jaksa karena programnya bermasalah.

Dia menambahkan, hal tersebut tidak boleh terjadi lagi, karena langkahnya tinggal merelokasikan anggaran dan programnya didalam Musrenbangnas dan menambahkan nomenklatur program infrastruktur pedesaan tanpa membawa warna bendera masing-masing partai. (si) foto:parle

# Kemenpera Diminta Buat Standart Mutu Bangunan

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat membuat standart mutu bangunan yang sama. Kementerian ini juga diminta untuk melakukan pengawasan terhadap rusunawa-rusunawa yang telah dibangun.



Sigit Sosiantomo, anggota Komisi V DPR RI

Hal itu dikemukakan Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo dalam rapat kerja dengan Menteri Perumahan Rakyat dan jajarannya, Rabu (30/5) yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow.

Sigit mengatakan, banyak bangunan rusunawa di beberapa daerah yang mutunya tidak standart, ada yang jelek dan sangat jelek sekali. Sementara yang jelek dan sangat jelek sekali itu harganya sama.

“Ini menunjukkan Kementerian ini tidak memiliki kontrol atau standart mutu bangunan yang sama. Kontrol ini bidangnya siapa dan bagaimana pertanggungjawabannya,” kata Sigit.

Sigit meminta kemenpera lebih serius menangani permasalahan ini. Karena hal ini terkait dengan hasil pemeriksaan BPK, dimana diantara beberapa point yang digarisbawahi salah satunya Menegpera belum memiliki standart kualitas bangunan PSU swadaya, akibatnya umur dari prasarana, sarana dan utilitas (PSU) tersebut menjadi lebih pendek dari yang diharapkan dan menimbulkan biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tinggi.

Hal lain yang menjadi keprihatinan Komisi V, rusunawa-rusunawa yang telah dibangun tersebut banyak yang

tidak ditempati. “Ini sangat menyedihkan, kalau program yang salah satu targetnya adalah mengurangi deadlock perumahan dan hasilnya seperti itu yang tercipta adalah kawasan kumuh baru atau rusun kumuh yang baru,” katanya.

Dia menambahkan, perumahan swadaya adalah program yang sangat ditunggu-tunggu khususnya masyarakat kota. Karena kebanyakan kota di Indonesia paling banyak rumah kumuhnya.

Tapi kalau standarisasi bangunan perumahan swadaya ini belum dimiliki bahkan PSUnya saja tidak ada standarisasinya, tentu yang terjadi jauh dari yang kita harapkan.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga mengharapkan Kemenpera lebih memperkuat kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Ini terkait erat dengan penyediaan lahan yang sering menjadi permasalahan. Pemerintah Daerah agar tidak menyediakan lahan yang tidak efektif untuk rusun yang tujuannya memenuhi deadlock perumahan.

“Jika lahan yang disediakan untuk pembangunan rusun ini tidak efektif, dikhawatirkan ini akan menimbulkan permasalahan baru, karena rusunawa tersebut tidak dihuni,” katanya.

Rapat Komisi V DPR dengan Menteri Perumahan Rakyat itu mengagendakan membahas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan rumah swadaya, rusunawa, rumah khusus dan PSU kawasan.

Pembangunan rusunawa dimaksudkan sebagai salah satu solusi dalam penyediaan permukiman layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di perkotaan.

Saat ini, Rusunawa menjadi model alternatif penurunan kawasan kumuh melalui penyediaan hunian horizontal, dimana pembangunan rumah vertikal dikota-kota besar sudah sangat terbatas lahannya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menyampaikan total pagu anggaran Tahun 2012 di Kemenpera sebesar Rp 10,637 triliun.

Sesuai permintaan Kementerian Keuangan, anaggaran kemenpera Tahun 2012 dipotong sebesar 149,9 miliar. Pemotongan bersumber dari belanja barang yang dibebankan secara proporsional ke satuan kerja masing-masing dengan catatan tidak mengurangi target pelaksanaan pembangunan fisik.

Djan Faridz menambahkan, target rusunawa yang semula 110 twin blok telah disesuaikan menjadi 172 twin blok dengan cara mengurangi jumlah lantai sebagian besar rusunawa menjadi dua atau tiga lantai, khususnya untuk kebutuhan rusunawa Pondok Pesantren, mahasiswa dan TNI.

Sementara untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) target RPJMN 240 unit dengan dana Rp 9.231,29 miliar, alokasi tahun 2012 sebesar 189.166 unit, dengan dana Rp 7.103,17 miliar. Untuk memenuhi target RPJMN, berarti kekurangan tahun 2012 sebesar 50.834 unit dan kekurangan dana sebesar Rp 2.135,12 miliar. (tt) foto: parle

# Baleg Segera Godok RUU Perjanjian Internasional

Baleg akan segera menggodok RUU Perjanjian Internasional. Pasalnya, Negara Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Internasional yang senantiasa mengadakan kerja sama dengan negara atau organisasi internasional untuk membawa kepentingan Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Anna Muawanah yang sekaligus memimpin rombongan, saat bertemu dengan Rektor Universitas Cenderawasih Fostus Simbiak dan jajarannya. Pertemuan ini dilakukan di gedung rektorat Uncen Jayapura Papua, Rabu (30/5) pagi.

Ketua Tim Rombongan Anna muawanah mengatakan, Kerja sama internasional salah satunya diwujudkan dengan sebuah instrument yang disebut perjanjian internasional.

“Perjanjian Internasional merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, pembuatan perjanjian internasional mempunyai peranan yang strategis bagi negara,”ujarnya.

Amandemen UUD 1945 pasal 11, lanjutnya, membawa hal baru dan proses pembuatan perjanjian internasional yang berbunyi Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus



Wakil Ketua Baleg Anna Muawanah saat menerima cinderamata dari Rektor Universitas Cenderawasih Papua

dengan persetujuan DPR.

Selain itu, dalam prakteknya perjanjian internasional yang telah dilakukan oleh Pemerintah sering dianggap merugikan kepentingan nasional, seperti perdagangan bebas, perjanjian tapal batas dan lain sebagainya. Adanya UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah menjadi hal baru yang belum diatur dalam UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Anna menambahkan, DPR telah mencoba melakukan identifikasi masalah yang terkait dengan UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang berdasarkan pasal 11 UUD 45. “Perjanjian internasional tersebut harus mendapat persetujuan DPR, tahapan mana dalam proses pembuatan perjanjian internasional, persetujuan dan sebagainya,”ujarnya. (spy)

## Komisi XI DPR Segera Pilih Pimpinan OJK 19 Juni Mendatang

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, DPR akan segera mengumumkan nama-nama pimpinan OJK pada 19 Juni mendatang.

“Kita akan memanggil pihak-pihak terkait jasa keuangan untuk mendengarkan masukan dan pendapat dan pandangannya terhadap 14 nama yang diajukan oleh Presiden,”kata Harry saat menerima masukan dari Himbara, Perbanas, Asbanda, Perbarindo dan Asibisindo, di Gedung Nusantara I, Selasa, (29/5).

Menurutnya, Komisi XI DPR juga akan mengundang PPAK, YLKI, serta ICW dan juga serikat pekerja Perbankan. “Kita akan memutuskan pada tanggal 19 juni dan nama-nama itu akan kita fit and proper test pada 7 juni-14 Juni,”paparnya.

Tahap pertama, lanjutnya, DPR akan memilih nama calon ketua yang disampaikan oleh Presiden SBY yaitu Muliaman

Hadad dan Achjar Ilyas. “Namun DPR tidak memiliki kewenangan untuk memilih nama pilihan pemerintah terhadap ketua OJK,”ujarnya.

Berikutnya, lanjut Harry, DPR akan memilih 6 nama anggota OJK. Dam tidak menentukan posisi jabatan OJK yang akan mereka jabat nantinya. (si)foto:wy/parle



# Sutan Bhatoegana Gantikan Teuku Rifky Harsya Jadi Ketua Komisi VII DPR

Sutan Bhatoegana (F-PD) menggantikan Teuku Rifky Harsya menjadi Ketua Komisi VII DPR.



Teuku Rifky Harsya berjabat tangan dengan Sutan Bhatoegana yang menggantikannya sebagai Ketua Komisi VII DPR

”Pergantian pimpinan Komisi merupakan wewenang Fraksi yang mengatur dan ini merupakan persetujuan Fraksi yang bersangkutan,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat memimpin acara pergantian pimpinan Komisi VII DPR, di Gedung Nusantara II, Senin, (28/5).

Menurut Pramono Anung, ada tiga

catatan terhadap pergantian pimpinan ini bahwa tidak ada satupun anggota dewan yang fotonya tersebar di HP kecuali Sutan Bhatoegana, dan beliau tidak pernah marah sedikitpun. “Saya mendapat delapan foto yang berbeda mengenai foto Sutan Bhatoegana melalui BBM dari istri saya,” papar Pram biasa dipanggil.

Dia menambahkan, sebelumnya Teuku Rifky telah memberikan kejelasan tersendiri bahkan saat kasus terakhir mengenai cadangan subsidi listrik Rp. 25 Triliun dapat diselesaikan dengan baik melalui kepemimpinan Teuku Rifky. “Semoga dibawah kepemimpinan Sutan Bhatoegana dan sepeninggalnya Teuku Rifky Komisi VII DPR bisa solid dan strategis juga sangat menentukan arah bangsa ini,” katanya.

Dia mengharapkan, semoga di bawah kepemimpinan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, beliau dapat lebih sering tampil untuk menjelaskan persoalan energi dan lingkungan hidup. “Apakah semua menyetujui adanya pergantian pimpinan ini?,” ujarnya. Setujuuu... ,jawab seluruh anggota Komisi VII DPR, Akhirnya Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengetuk palu pimpinan sebagai bentuk persetujuannya.

Kemudian acara dilanjutkan serah terima palu pimpinan dari Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada Ketua Komisi VII DPR yang baru Sutan Bhatoegana, dan Ketua Komisi yang lama, Teuku Rifky Harsya.(si)/foto:iw

## Komisi V Minta Penjelasan Menhub Terkait Jatuhnya Sukhoi

Komisi V DPR RI meminta penjelasan Menteri Perhubungan selaku regulator dan penjelasan dari instansi/lembaga terkait lainnya untuk mengetahui secara resmi penyebab dan hal-hal yang berkaitan dengan musibah kecelakaan pesawat Sukhoi SJ 100 yang terjadi di Gunung Salak, Bogor, pada 9 Mei lalu.

Berbagai komentar dan tanggapan telah berkembang di media massa dan masyarakat termasuk juga komentar dari para anggota dewan mengenai penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Namun komentar

dan tanggapan tersebut belum didukung dengan bukti-bukti yang memadai sehingga hanya bersifat pandangan dan pendapat pribadi.

Untuk itu, penjelasan dari Menteri Perhubungan dan instansi terkait sa-

ngat diperlukan untuk mendapatkan informasi resmi penyebab jatuhnya pesawat buatan Rusia tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Komisi V Yasti Soepredjo Mokoagow saat memimpin rapat kerja dan rapat



Ketua Komisi V Yasti Soepredjo Mokoagow (kanan) saat memimpin rapat kerja

dengar pendapat dengan Menteri Perhubungan, Ketua Basarnas, Ketua KNKT, Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), PT Angkasa Pura II, GM. ATS, Direktur Utama PT Trimarga Rekatama, Senin (28/5) di gedung DPR.

Yasti mengatakan, untuk mengetahui penyebab kecelakaan pesawat, memang memerlukan penyelidikan yang komprehensif dan mungkin bisa memakan waktu yang cukup lama.

Namun, katanya, ada beberapa hal yang sering menjadi perbincangan apabila terjadi kecelakaan pesawat diantaranya, faktor manusia seperti pilot atau petugas ATS, faktor cuaca dan faktor teknis atau struktur pesawat.

Kecelakaan pesawat Sukhoi Super Jet 100 yang sedang mengadakan Joy Flight ini hendaknya dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga dari kejadian tersebut untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pengaturan penerbangan nasional ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi V H. Mulyadi meminta Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera mengumumkan penyebab jatuhnya pesawat tersebut, jika proses penyelidikan telah selesai dilakukan.

Selama ini, menurut Mulyadi, dalam kecelakaan pesawat Garuda, Merpati atau kecelakaan pesawat lainnya, KNKT tidak pernah memberikan

keterangan secara resmi kepada masyarakat melalui Konferensi Pers atau lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan EE. Mangindaan menyampaikan pesawat Sukhoi Superjet 100 telah mendapatkan legalitas baik berdasarkan Hukum Penerbangan secara Internasional maupun Hukum Penerbangan secara Nasional.

Diantaranya UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Keputusan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, SKEP Dirjen Perhubungan Udara No. 195 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan persetujuan terbang (Flight Approval).

Sementara legalitas ijin masuk pesawat Sukhoi Superjet 100 berdasarkan Diplomatic Clearance dari Kementerian Luar Negeri, Security Clearance dari Markas Besar TNI dan Flight Clearance dari direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Setelah mendapat legalitas ijin masuk pesawat Sukhoi ke Indonesia, baru penerbangan Demo Flight untuk promosi bisa dilakukan.

Mangindaan menambahkan, pertimbangan teknis penerbitan Flight Clearance Demo Flight adalah pesawat Sukhoi Superjet 100 telah mendapatkan Sertifikat Tipe dari Interstate Aviation Committee-Aviation Register (IAC-AR) pada tanggal 28 Januari 2011 dari negara produksi (Rusia).

Selain itu, telah mendapatkan Validasi Sertifikat Tipe pesawat Sukhoi Superjet 100 juga telah diterbitkan oleh Otoritas Penerbangan Sipil Eropa (European Aviation Safety Agency/EASA) pada tanggal 3 Februari 2012.

Sertifikat tersebut di atas sudah mengacu kepada Konvensi Chicago 1944 pada Annex 8, dimana Indonesia juga telah mengadopsi dengan Keputusan menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Kepmenhub Nomor KM 38 Tahun 2001 tentang Standard Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara kategori Transportasi dan mengacu kepada Civil Aviation Safety Regulation/CASR Part 25.

Rencananya pesawat Sukhoi ini akan melakukan Demo Flight pada hari Rabu dan Kamis, 9-10 Mei. Pelaksanaan Demo Flight pertama berjalan sesuai dengan rencana, namun demo ke dua mengalami musibah itu.

Sementara Ketua BMKG Sri Woro B. Harijono mengatakan. Terkait dengan musibah pesawat Sukhoi Superjet 100 tidak ditemui adanya cuaca signifikan yang dapat mempengaruhi penerbangan (tidak ada awan Cumulonimbus).

Cumulonimbus adalah awan konvektif yang ketinggian dasar awan sekitar 600 m dari permukaan tanah dan puncak awan dapat lebih dari 10.000 m. Atau awan yang bisa menimbulkan hujan lebat dan angin kencang. (tt) foto:wy/parle

# Komisi I Desak Kominfo Tingkatkan Pengawasan dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio

Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio agar penggunaannya sesuai dengan peruntukan dan mengacu pada izin stasiun radio yang ada.



Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Untuk itu, Komisi I DPR meminta Kemenkominfo bertindak lebih tegas bila menemukan adanya penggunaan frekuensi radio yang tidak berizin atau tidak sesuai Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin

Amatir Radio (IAR).

Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita, dengan Dirjen Sumberdaya Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Budi Setiawan, Dirjen

Perhubungan Udara Kemenhub Harry Bakti, Dirut Angkasa I dan II, membahas tata kelola frekuensi untuk penerbangan di Indonesia, Selasa (29/5), di Gedung DPR RI.

Agus mengatakan, Komisi I mendukung langkah Kemenkominfo mengupdate peralatan yang digunakan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dalam rangka peningkatan kinerja Kemenkominfo. Sehingga ke depan tidak mengganggu penerbangan di Tanah Air.

Mengingat frekuensi radio penerbangan diatur dalam UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, dan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi, Komisi I DPR meminta pemerintah segera menyatukan pengaturan frekuensi radio penerbangan sebagaimana diatur di kedua UU tersebut. Agar regulasi tata kelola frekuensi radio menjadi lebih baik.

Agus menambahkan, RDP ini Komisi I juga membuat catatan, yaitu berkaitan dengan kontrol wilayah udara RI di wilayah Kepulauan Riau, Pulau Natuna hingga Pulau Batam, yang sudah berlangsung puluhan tahun oleh Singapura. Menurut Komisi I, kontrol wilayah oleh Singapura itu harus diakhiri demi menegakkan kedaulatan wilayah udara RI.

Menurut Agus, masalah tersebut juga berkaitan dengan wilayah Komisi V, terkait koordinasi kerja dengan Kemenhub, maka Komisi I yang membidang komunikasi dan informatika berpandangan perlunya menggelar rapat gabungan untuk membahas permasalahan ini dengan Komisi V yang membidangi perhubungan. (as) foto: wy/parle

\*\*\*

# BAKN Kunjungi Parlemen dan BPK Inggris

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke parlemen dan BPK Inggris kemudian parlemen dan BPK Belanda atas undangan USAID/PROREP, selama 6 hari dari tanggal 14 Mei 2012.

Pernyataan itu sampaikan Sumarjati Arjoso dari Fraksi Partai Gerindra dengan didampingi Anggota Eva Sundari dari Fraksi PDIP, saat Konperensi Pers, digedung DPR RI, Kamis (31/5).

Selama 3 hari di Inggris, BAKN DPR RI telah melakukan diskusi dengan Office for Budget Responsibility (Badan yang independen dibentuk oleh pemerintah untuk menyusun perencanaan anggaran berdasarkan kajian makro untuk beberapa tahun ke depan), National Audit Office (Badan Pemeriksa Keuangan), Public Account Committee (Komite Akuntabilitas Publik), Public Account Commission (Komisi Keuangan di Parlemen), All Party Parliamentary Group on Indonesia (Kaukus Anggota Parlemen untuk Indonesia), The Lord Norton of Louth (Majelis Tinggi Parlemen).

Di samping itu, di parlemen Inggris BAKN juga mengikuti sidang yang membahas hasil audit National Audit Office (NAO) antara anggota parlemen dengan Kementerian Keuangan tentang Regional Growth Fund

Dan selama 3 hari di Belanda, BAKN DPR RI telah melakukan diskusi dengan The Netherlands Institute of Chartered Account, The Netherlands Court of Audit (Badan Pemeriksa Keuangan), CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (Biro Analisis Kebijakan Ekonomi), The Ministry of Finance (Kementerian Keuangan), The Public Expenditure Committee (Komite Pengawasan Penggunaan Keuangan Negara), The Bureau for Research and Public Expenditure (BRPE).

Di parlemen Belanda, BAKN juga mengikuti sidang dan debat antara komisi keuangan Legislatif dengan Kementerian Keuangan tentang Proposal Dana Talangan untuk Krisis Keuangan Uni Eropa.

Dari diskusi-diskusi yang dilakukan



Ketua BAKN Sumarjati Arjoso (kiri) dan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Eva Sundari (kanan)

BAKN dengan parlemen di Inggris dan Belanda diperoleh banyak masukan untuk memperkuat fungsi kelembagaan (BAKN) dan meningkatkan kapasitas anggota dewan dan yang paling utama adalah untuk perbaikan amandemen UUD MD3.

Dari masukan-masukan hasil diskusi tersebut, dapat BAKN menyimpulkan bahwa perlunya dilakukan perubahan dan penyempurnaan undang-undang tentang pengawasan keuangan negara (UU No. 15 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2006).

Selain itu, Perlunya dilakukan perubahan/penyempurnaan UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MD3, terutama tentang kewenangan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yaitu melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR RI, menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 kepada komisi, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi, memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan keuangan,

BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara, BAKN dapat mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan.

Dengan perubahan kewenangan BAKN diatas, maka tata kerja BAKN juga perlu disempurnakan. Sumarjati Arjoso menjelaskan perlunya dibentuk BAKN di setiap DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan legislatif, karena BAKN DPR RI tidak akan dapat melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara secara menyeluruh dari pusat sampai daerah.

Selanjutnya, perlunya memperbaiki mekanisme kerja pembahasan anggaran yang dilakukan komisi-komisi dan Badan Anggaran DPR RI, serta perlunya mempertimbangkan untuk membentuk suatu badan independen yang terlepas dari pengaruh eksekutif dan legislatif dalam membuat analisis-analisis ekonomi dan moneter untuk penyusunan rancangan anggaran negara.(as) foto:wy/parle

# Jampidsus Klarifikasi Pernyataan Tentang DPR Hulu Korupsi

Beberapa anggota Komisi III meminta klarifikasi terkait pernyataan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto yang menyebut DPR hulunya korupsi.

Pernyataan yang disampaikan pada saat peluncuran buku Negeri Mafia, Republik Koruptor karya Benny K. Harman (Ketua Komisi III) dinilai perlu penjelasan lebih lanjut.

“Apa yang melatar belakangi ketika saudara mengatakan korupsi hulunya di DPR? Kita punya komitmen yang sama untuk memberantas korupsi, artinya ketika saudara mengeluarkan statement seperti itu saudara mengetahui bahwa sumber korupsi dari DPR seperti ini, dimana dan bagaimana cara mengatasinya. Mari sama-sama kita lakukan itu,” kata anggota Komisi III, Syarifudin Suding saat RDP dengan jajaran JAM Kejaksaan Agung, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/5/12).

Politisi Partai Hanura ini mengaku hadir dalam acara peluncuran buku yang berisikan catatan pribadi Benny K.

Harman selama menjadi Ketua Komisi III. Ia menekankan tidak menafikan kalau korupsi memang terjadi di institusi DPR tapi ia mengaku terkejut ketika pernyataan itu datang dari Jampidsus.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III dari FPG Nudirman Munir. Ia menekankan lebih baik Jampidsus menyebutkan saja nama-nama pelaku korupsinya apabila memang ada. “Saya juga merasakan pedihnya kata-kata Jampidsus ini. Kalo memang benar begitu, sebutkan saja dari 560 orang anggota DPR siapa?. Saya pribadi berkeyakinan masih banyak kok yang baik di DPR ini,” tandasnya.

Dalam klarifikasi yang disampaikan kepada wartawan Jampidsus menjelaskan pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi pidato Benny K. Harman yang menegaskan pemberan-

tan korupsi di Indonesia perlu peran anggota dewan.

“Pembicara lain juga menyebut korupsi peraturan itupun lebih berbahaya dari pada korupsi uang, jadi korupsi disini diartikan secara luas. Kalau terkait peraturan itu kan berarti pembuat UU, itu kan di dewan tapi bukan berarti dewan tempatnya koruptor. Jadi kalau kita mau bersihkan korupsi di Indonesia letak hulunya dalam bidang peraturan ya di Dewan” jelas Andhi Nirwanto.

Ia kemudian menawarkan untuk memberantas korupsi di negeri ini dengan memperbaiki sistem sejak dari hulu sampai ke hilir. Hulu proses pembuatan aturan perundang-undangan di DPR dan hilir implementasi di lapangan. “Jadi pernyataan saya itu bukan tuduhan,” demikian Jampidsus. (iky)foto: wy/parle



Jamwas Kejaksaan RI Marwan Efendy (kiri) dan Jampidsus Kejaksaan RI Andhi Nirwanto (kanan)

# Nova Riyanti Yusuf Gantikan Ahmad Nizar Shihab Jadi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Nova Riyanti Yusuf menggantikan rekan satu fraksinya Ahmad Nizar Shihab menjadi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.



Serahterima Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf menggantikan rekan satu fraksinya Ahmad Nizar Shihab

**P**enetapan penggantian pimpinan Komisi IX DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dalam suasana santai diselingi senda gerau dari Anggota Komisi IX DPR RI yang hadir dalam acara penetapan tersebut.

“Apakah dengan penetapan dan serah terima pimpinan Fraksi Partai Demokrat dari Dokter Ahmad Nizar Shihab Spesialis Anestesi kepada Dokter Nova Riyanti Yusuf Spesialis Jiwa dapat disetujui seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI,” kata Taufik Rabu (30/5) di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung DPR RI, Jakarta.

Secara serempak seluruh Anggota Komisi IX mengatakan “Setuju”. Taufik pun mengetukkan palu, tanda persetujuan.

Atas nama Pimpinan DPR RI Taufik mengucapkan selamat kepada Nova Riyanti Yusuf dan mengucapkan teri-

ma kasih atas peran serta dan keaktifan, kontribusi, pemikiran, energy dan tenaga serta hal-hal yang telah dilakukan Ahmad Nizar Shihab.

“Apalagi kami sering terkait langsung pada saat pembahasan RUU BPJS, RUU BPJS merupakan salah satu karya monumental yang terbaik dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX serta Anggota Pansus yang telah peduli pada bangsa dan negara terhadap aspek kesejahteraan sosial. Saya memberikan Applause buat teman-teman semua,” papar Taufik diringi tepuk tangan yang hadir.

“Dan kepada Dokter Nova Riyanti Yusuf, kami mengucapkan selamat dalam meneruskan pimpinan dari Fraksi Partai Demokrat menjadi Wakil Ketua menggantikan Dokter Ahmad Nizar Shihab,” tambahnya.

Saat diberikan kesempatan, Nova Riyanti Yusuf mengucapkan terima

kasih kepada Taufik Kurniawan yang telah menetapkan penggantian pimpinan Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, semoga dirinya dapat memberikan kontribusi positif.

“Siapapun yang menggantikan Dokter Nizar untuk saat ini akan sulit untuk menandinginya, karena dokter Nizar telah menghasilkan sebuah UU BPJS sebuah UU yang Legendary,” papar Nova.

Sebuah kehormatan bagi dirinya, bahwa Partai Demokrat memberikan kepercayaannya untuk menggantikan Dokter Nizar. Nova mengharapkan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI dapat memberikan dukungan karena ini merupakan proses transisi yang bisa mudah ataupun tidak mudah. Tapi dirinya berharap dapat beradaptasi dengan cepat, sehingga dapat memberikan manfaat bagi Komisi IX DPR RI. (sc)foto:wy/parle

# Askes dan Jamsostek Siap Bertransformasi Jadi BPJS Kesehatan Dan Ketenagakerjaan

Komisi IX DPR RI meminta PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) mempersiapkan transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan secara sistemik, konsisten dan terpadu.



Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Soepriyatno dalam Rapat Dengan Pendapat Umum dengan Dirut PT Askes I Gede Subawa dan Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5)

“Untuk mempersiapkan transformasi tersebut, PT Askes dan PT Jamsostek diharapkan menetapkan manfaat jaminan kesehatan sesuai dengan Pasal 22 UU SJSN, memperluas target cakupan kepersertaan program jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan sehingga tercapai universal coverage tahun 2014,” kata Soepriyatno.

Soepriyatno juga meminta kedua perusahaan tersebut memperluas kepersertaan program jaminan kesehatan dan pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek kepada BPJS Kesehatan, dan membuat proyeksi kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan.

Komisi IX DPR RI juga mendorong PT Askes dan PT Jamsostek untuk melakukan pengkajian substansi terkait dengan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran, Rancangan Perpres Komisaris PT Askes dan PT Jamsostek menjadi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu Komisi IX DPR RI meminta PT Askes dan PT Jamsostek untuk mempertimbangkan rekrutmen tenaga verifikator independen Jamkesmas.

Agar berkonsentrasi dalam melaksanakan BPJS Kesehatan, PT Askes diminta untuk meleburkan PT Inhealth kembali kepada PT Askes sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Menjawab permintaan Komisi IX DPR RI, Dirut PT Askes dan PT Jam-

sostek menyatakan kesiapannya di-transformasi menjadi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Dirut PT Askes I Gede Subawa mengaku sudah melakukan berbagai persiapan untuk perubahan status ke badan hukum publik.

“Kami sudah siap ketika PT Askes dibubarkan menjadi BPJS Kesehatan. Seluruh SDM kami tidak ada yang keberatan. Prinsipnya, pembubaran ini tidak ada likuidasi SDM,” tegas I Gede Subawa.

Subawa menjelaskan, untuk kesiapan SDM, PT Askes telah melakukan peningkatan kompetensi karyawan karena saat menjadi BPJS Kesehatan, jumlah peserta yang dilayani semakin banyak. Dari sisi psikologis, PT Askes telah memberikan berbagai masukan agar karyawan tidak kaget ketika terjadi perubahan perseroan menjadi badan.

“Di 2014, PT Askes akan bubar namun tanpa likuidasi. Ini yang selalu kami tanamkan ke karyawan Askes agar tidak timbul keresahan. Alhamdulillah seluruh karyawan Askes di semua kantor cabang menyatakan dukungan penuh,” terangnya.

Sementara untuk peningkatan layanan, Askes akan menambah sekitar 48 kantor cabang sehingga totalnya menjadi 150 kantor yang akan melayani 140 juta peserta. Di mana 90 juta adalah Jamkesmas, 16,6 juta peserta Askes, dan sisanya dari peserta Jamsostek dan Asabri.

Sedangkan Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga menerangkan bahwa saat ini PT Jamsostek telah menyelesaikan 80% pengalihan aset sebagai BPJS bidang ketenagakerjaan. Untuk pengalihan itu, Jamsostek melibatkan

sejumlah pihak seperti BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sebagai konsultan independen, dan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sebagai konsultan.

Namun terkait kelanjutan program investasi PT Jamsostek bila telah beralih menjadi BPJS ketenagakerjaan, menurut Hotbonar Jamsostek mendapati satu hal yang belum terlalu jelas. yakni, pemerintah belum mene-

tapkan institusi perancang RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) terkait peralihan tersebut.

Hotbonar menginginkan agar dalam peralihan itu, sebaiknya ada semacam proyek percontohan yang dijalankan dan ada masa transisi peralihan dari perseroan menjadi BPJS ketenagakerjaan.

“Sebagai contoh penerapan SJSN secara mikro, sekarang ada sebuah

daerah yang pas menjadi contoh ideal yakni Kabupaten Purwakarta. Di sana, untuk iuran sosial peserta, pemerintah akan membayar menggunakan APBD ke Jamsostek. Itu nilainya sekitar Rp 100 miliar,” terang Hotbonar.

Hotbonar menambahkan ada beberapa daerah lain yang sudah menjalankan pola seperti itu, namun belum seperti di Kabupaten Purwakarta. (sc) foto:wy/parle

## Kerjasama Indonesia-Pakistan dapat Kenalkan Demokrasi di Negara Islam

Indonesia dan Pakistan yang berpenduduk mayoritas muslim sudah dikenal sebagai negara yang berhasil menerapkan nilai-nilai demokrasi. Kondisi ini dapat digunakan parlemen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama sekaligus memperkenalkan demokrasi ke negara-negara Islam lain di dunia.

“Parlemen kedua negara sudah dapat bersama-sama buktikan prinsip Islam tidak berlawanan dengan demokrasi. Kita bisa menjadi model demokrasi bagi negara-negara Islam lain,” kata anggota BKSAP Abdurrahman Abdullah saat menerima kunjungan Ketua Komisi HAM Parlemen Pakistan, Riaz Fatyana di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/12).

Sejauh ini kedua negara sudah menjalin kerjasama yang baik di bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Nilai perdagangan periode Januari 2012 tercatat US\$122 juta meningkat 91,7 persen dibanding periode sebelumnya. Pakistan setiap tahunnya menawarkan bea siswa bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar ilmu kedokteran. Demikian pula Indonesia membuka program Dharmasiswa untuk kuliah di berbagai universitas di Indonesia.

Hubungan parlemen kedua negara sejauh ini sudah terjalin dalam pertemuan-pertemuan internasional seperti IPU, PUIC dan APA. Bahkan pada bulan Mei 2012 lalu delegasi Grup Kerjasama Bilateral DPR RI – Pakistan sudah berkunjung ke Pakistan.

“Kami berharap kerjasama dapat

terus ditingkatkan terutama dukungan Pakistan kepada Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Presiden Parlemen Negara-negara Anggota OKI – PUIC,” ujar Andi Rahmat anggota KGSB DPR RI – Pakistan.

menteri pendidikan, saya terkejut dan kagum melihat kemajuan ekonomi dan capaian yang telah dibuat negara ini,” paparnya.

Ia menyatakan persetujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang



Anggota BKSAP Abdurrahman Abdullah (kanan) saat menerima kunjungan Ketua Komisi HAM Parlemen Pakistan Riaz Fatyana (Kiri)

Dalam sambutannya Riaz Fatyana yang juga mantan Menteri Pendidikan Pakistan ini menjelaskan kedatangannya ke DPR kali ini sebagai balasan atas kunjungan delegasi Indonesia sebelumnya. Ia mengaku terkejut melihat kemajuan Indonesia. “Saya terakhir kali datang tahun 1995 sebagai

pendidikan, kebudayaan dan lebih jauh people to people contact. “Salah satu program yang dapat segera dilakukan adalah pertukaran pelajar, mereka nantinya dapat menjalin kerjasama dua negara di masa datang,” demikian Riaz. (iky)foto:wy/parle

\*\*\*



# Komisi IX DPR RI Terima Spartan

Komisi IX DPR RI hari ini, Kamis (24/5) menerima sekitar 200 perwakilan pekerja tambang yang tergabung dalam Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional (Spartan).



Ribka Tjipaning Ketua Komisi IX DPR RI saat menerima perwakilan pekerja tambang di Gedung DPR

Mereka mengadukan nasibnya yang terancam pasca penerbitan Permen ESDM 07/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang ditujukan pada semua industri tambang dalam negeri.

Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjipaning yang menerima perwakilan pekerja tambang tersebut menyatakan dapat menerima aspirasi dan masukan-masukan yang disampaikan oleh Spartan.

Ribka menyatakan masukan-masukan tersebut menjadi prioritas Komisi IX DPR RI, yang akan disampaikan ke Komisi VII DPR RI dan saat Raker/RDP Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

“Masalah yang dipermasalahkan sebetulnya Permen ESDM yang merupakan domain Komisi VII yang bermitra dengan ESDM, tapi tidak ada salahnya kalau mereka datang ke Komisi IX DPR RI karena mereka khawatir terjadi PHK memang ke Komisi IX. Untuk tuntutannya mengenai cabut Permen itu ke Komisi VII,” papar Ribka kepada wartawan setelah menerima Spartan.

Sementara Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka (F-PDIP) yang ikut menerima Spartan menyatakan bahwa dirinya sepakat kalau kita ingin adanya industri lanjutan sesuai dengan Permen sebagai turunan dari UU Minerba.

“Tetapi jangan sampai justru terjadi diskriminatif terhadap perusa-

haan dalam negeri sementara batasan untuk tidak boleh mengekspor bagi perusahaan multinasional yaitu lima tahun. Tapi perusahaan dalam negeri diberi waktu tiga bulan dia harus mampu membangun industri lanjutan,” kata Rieke.

Menurut salah satu perwakilan Spartan, kedatangan mereka merupakan wujud kekhawatiran akan nasib jutaan pekerja tambang di perusahaan tambang nasional di seluruh Indonesia yang terpojok dengan Permen tersebut.

Pasalnya para pengusaha tambang dalam negeri mengancam akan menutup usaha mereka karena menilai Permen tersebut tebang pilih dan terkesan dipaksakan untuk membunuh industri tambang kecil.

“Kami minta nasib kami dan keluarga ikut dimasukkan dalam pertimbangan yang diambil oleh pemerintah. Sehingga mereka tidak semena-mena dalam mengeluarkan aturan,” tuturnya.

Seperti diketahui Peraturan Menteri ESDM no 07/2012 yang diterbitkan khusus untuk pemegang IUP dan IPR mewajibkan agar pengusaha tambang nasional di luar pemegang Kontrak Karya Pertambangan membangun smelter dan melakukan pemurnian bahan tambang yang akan diekspor. Belakangan Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan menetapkan aturan baru dimana 65 produk mineral logam dan non logam dikenai bea keluar 20 persen jika tetap melakukan ekspor bahan tambang mentah.

Itupun dibarengi dengan aturan dari Kementerian ESDM yang mewajibkan verifikasi ulang dan menetapkan sejumlah persyaratan bagi perusahaan tambang nasional yang ingin tetap melakukan ekspor. (sc)foto:wy/parle

# Ketua DPR Marzuki Alie Kampanyekan Budaya Bersepeda

Dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-104, tahun 2012, Koordinatoriat Korpri DPR-DPD-MPR mengadakan acara sepeda sehat Senayan yang diikuti oleh ratusan pecinta sepeda.

Saat sambutannya, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, kegiatan ini dalam rangka mengkampanyekan pola hidup sehat. Selain itu dengan mengendarai sepeda kita telah turut serta mengurangi polusi. "Ini adalah kampanye. Kampanye hidup se-

kompleks parlemen Senayan.

Marzuki mengingatkan pentingnya berolahraga, khususnya bagi warga kompleks DPR/MPR/DPD dengan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia. Lebih lanjut Marzuki menghimbau supaya pemerintah daerah memberi-

Ungkapnya.

Peserta dilepas pada pukul 08.00 WIB, menempuh rute Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia kemudian tempat finish kembali ke halaman gedung parlemen. Pembukaan acara di-meriahkan oleh atraksi Marching Band



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat mengikuti kegiatan Sepeda Sehat Senayan dalam rangka peringatan hari Kebangkitan Nasional ke-104, tahun 2012

hat dengan memanfaatkan kendaraan anti polusi,"kata ketua DPR RI Marzuki alie pada acara Sepeda Sehat Senayan 2012 yang dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari, Sekjen DPR Nining Indrasaleh beserta jajarannya yang turut menjadi peserta sepeda santai pada Minggu pagi (27/5) di halaman

kan fasilitas untuk orang bersepeda. "Sebenarnya ingin bersepeda dari rumah ke kantor sekaligus olahraga. Tapi khawatir karena jalan bersepedanya tidak ada, jalan motor pun campur dengan jalan roda empat. Nah kita ini menghimbau pemerintah memberikan hak rakyat untuk bersepeda,"

dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan juga aksi akrobatik sepeda freestyle dari sponsor. Di tempat finish, tiket para peserta diundi melalui lucky draw dengan puluhan hadiah menarik dan dihibur penampilan berbagai band beraneka aliran musik. (ry) foto: parle



Wakil Ketua DPR Anis Matta menerima Duta Besar Ekuador untuk Indonesia Eduardo Calderon, di Ruangannya. 29 Mei 2012. foto:WY



Wakil Ketua DPR Priyo Budhi Santoso memimpin pleno Penetapan Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menggantikan Benny K. Harman. 31 Mei 2012. Foto:RY



Serahterima Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nova Riyanti Yusuf menggantikan rekan satu fraksinya Ahmad Nizar Shihab, dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. 30 Mei 2012. foto:WY



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima Wakil Dubes Australia untuk Indonesia Davide Engel, di ruang kerjanya, 1 Juni 2012. foto:IW



Tim Panja Hambalang Komisi X DPR mengadakan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Bukit Hambalang, Sentul, Bogor. 30 Mei 2012. Foto:IW



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menerima Ketua Parade Nusantara Sudir Santoso (kanan) dan Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pusat Ubaidi Rasidi (kiri) serta rombongan, di Gedung Nusantara, 31 Mei 2012 foto:IW

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS **ASPIRASI DPR RI** di **08119443344**  
Layanan Informasi Publik di [www.ppid.dpr.go.id](http://www.ppid.dpr.go.id)